

**Kemandirian Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan  
Pendapatan di Indonesia**



**Tesis oleh**

**Andi Nurul Astria Arief**

**01022681923025**

**Ilmu Ekonomi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Magister Ilmu Ekonomi*

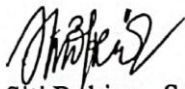
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
PASCA SARJANA PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : Kemandirian Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan  
Pendapatan di Indonesia  
Nama : Andi Nurul Astria Arief  
NIM : 01022681923025  
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi  
Bidang Kajian Utama : Ilmu Ekonomi

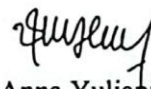
Menyetujui,

**Pembimbing Pertama,**



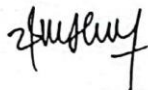
Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si  
NIP. 196903142014092001

**Pembimbing Kedua,**



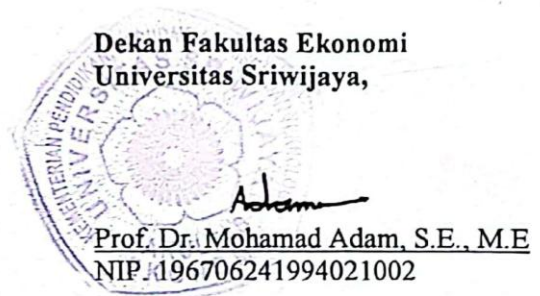
Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si  
NIP. 197007162008012015

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Ekonomi,**



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si  
NIP. 197007162008012015

**Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Sriwijaya,**



Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E  
NIP. 196706241994021002

Tanggal Lulus : 06 Januari 2022 (tanggal lulus ujian tesis)




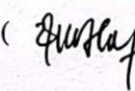
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI

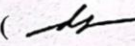
Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662 Tel: (0711) 580964, 580646 Fax: (0711) 580964  
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139 Laman: <http://fe.unsri.ac.id> – email : [dekan@fe.unsri.ac.id](mailto:dekan@fe.unsri.ac.id)

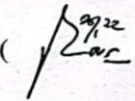
---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**Ketua** : Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si (  )  
NIP. 196903142014092001

**Sekretaris** : Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si (  )  
NIP. 197007162008012015

**Anggota** : (1) Prof. Dr. Didik Susetyo, M.Si (  )  
NIP. 196007101987031003

(2) Dr. Sukanto, S.E., M.Si (  )  
NIP. 197403252009121001



**BUKTI TELAH MEMPERBAIKI TESIS MAHASISWA PROGRAM  
STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si		
2.	Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si		
3.	Prof. Dr. Didik Susetyo, M.Si		
4.	Dr. Sukanto, S.E., M.Si		

Menerangkan bahwa:

Nama : Andi Nurul Astria Arief  
NIM : 01022681923025  
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi  
Bidang Kajian Utama : Ilmu Ekonomi  
Judul Tesis : Kemandirian Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan  
Pendapatan di Indonesia

Telah memperbaiki tesis hasil ujian.

Palembang, Januari 2022  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si  
NIP. 197007162008012015



## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Nurul Astria Arief  
Tempat dan tanggal lahir : Kerinci, 20 Oktober 1997  
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi  
NIM : 01022681923025

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah.

Palembang, 16 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,



Andi Nurul Astria Arief  
NIM. 01022681923025

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Nurul Astria Arief  
Tempat dan tanggal lahir : Kerinci, 20 Oktober 1997  
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi  
NIM : 01022681923025

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “Kemandirian Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”, bebas dari plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah saya terdapat indikasi plagiarism, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Palembang, 16 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Andi Nurul Astria Arief  
NIM. 01022681923025

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Kemandirian Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Magister Saint Program Strata Dua (S-2) Bidang Kajian Utama Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa selama penelitian dan penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan. Atas segala keterbatasan dalam penyusunan tesis ini, penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Palembang, Januari 2022



Andi Nurul Astria Arief

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam menghadapi kendala penelitian, sehingga dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si selaku Pembimbing Pertama dan Ibu Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si selaku Pembimbing Kedua sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan memberikan ilmunya serta membimbing dan mengarahkan selama penyusunan tesis ini.
2. Almarhum Bapak Prof. Syamsurijal, A.K., PhD selaku Pembimbing proposal tesis yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan ilmunya serta membimbing dan mengarahkan hingga pelaksanaan ujian proposal tesis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si. dan Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si selaku penguji tesis yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam peningkatan kualitas tesis.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE sebagai Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Kedua orangtua, keluarga besar, hingga orang-orang terdekat yang senantiasa memberikan doa, nasihat, arahan dan juga motivasi.

Palembang, Januari 2022



Andi Nurul Astria Arief



## ABSTRAK

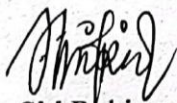
### KEMANDIRIAN FISKAL, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Andi Nurul Astria Arief; Siti Rohima; Anna Yulianita

Kinerja pembangunan ekonomi dilihat dari perspektif makro telah menciptakan dilema bagi pemerintah, khususnya pada pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang memiliki peran penting tetapi sulit untuk berjalan beriringan. Berdasarkan model Tiebout, desentralisasi fiskal dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kemandirian fiskal daerah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dinamis antara kemandirian fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data panel dari 34 provinsi di Indonesia periode 2012 - 2020. Teknik analisis yang digunakan adalah PVECM *Granger Causality*. Penelitian ini menemukan terdapat kausalitas jangka panjang antara kemandirian fiskal, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Dalam jangka pendek, ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan kausalitas dua arah yang dapat saling mempengaruhi serta kemandirian fiskal hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

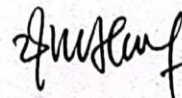
*Kata Kunci: kemandirian fiskal, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan*

**Pembimbing Pertama,**



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si  
NIP. 196903142014092001

**Pembimbing Kedua,**



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si  
NIP. 197007162008012015

**Ketua Program Studi**



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si  
NIP. 197007162008012015

## ABSTRACT

### FISCAL INDEPENDENCE, ECONOMIC GROWTH, AND INCOME INEQUALITY IN INDONESIA

Andi Nurul Astria Arief; Siti Rohima; Anna Yulianita

The performance of economic development viewed from a macro perspective has created a dilemma for the government, particularly in terms of economic growth and income inequality, which have an important role but are difficult to go hand in hand. Based on the Tiebout model, fiscal decentralization can be used as a tool to encourage regional fiscal independence in the implementation of economic development which is considered capable of increasing economic growth and holding down the income inequality. This study aims to analyze the dynamic relationship between the fiscal independence, economic growth, and income inequality in Indonesia. The data used are cross-sectional data from 34 provinces in Indonesia for the period 2012 to 2020. The analytical approach used is a panel data dynamic relationship model with PVECM granger causality. There's a long-term causality between fiscal independence, income inequality, and economic growth. In the short term, fiscal independence only affects economic growth significantly. The income inequality and economic growth have a two-way causality that can influence each other in the short-term balance. In the long term, economic growth has a positive significant effect on income inequality.

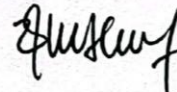
*Keyword: fiscal independence, economic growth, income inequality*

First Advisor,



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si  
NIP. 196903142014092001

Second Advisor,



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si  
NIP. 197007162008012015

Head of Study Program



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si  
NIP. 197007162008012015

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Landasan Teori .....	13
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Neoklasik.....	13
2.1.1.2 Teori Pertumbuhan Endogen.....	14
2.1.1.3 Teori Pertumbuhan Kuznet .....	16
2.1.2 Ketimpangan Pendapatan.....	17
2.1.2.1 Hukum Pareto .....	17
2.1.2.2 Koefisien Gini .....	20
2.1.3 Kemandirian Fiskal .....	22
2.1.3.1 Desentralisasi Fiskal.....	22
2.1.3.2 Tingkat Kemandirian Fiskal.....	24

2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
2.3 Kerangka Pikir.....	34
2.4 Hipotesis.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	37
3.2 Data Penelitian.....	37
3.3 Teknik Analisis.....	38
3.3.1 Analisis <i>Vector Autoregressive</i> (VAR).....	39
3.3.1.1 Uji Stasioneritas.....	40
3.3.1.2 Penentuan Lag Optimal.....	41
3.3.1.3 Uji Kointegrasi.....	42
3.3.1.4 <i>Vector Error Correction Model</i> (VECM).....	42
3.3.1.5 <i>Impulse Response Function</i> (IRF).....	44
3.3.1.6 <i>Variance Decomposition</i> .....	44
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Gambaran Umum.....	46
4.1.1 Kemandirian Fiskal Daerah di Indonesia.....	46
4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.....	51
4.1.3 Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.....	57
4.2 Hasil Penelitian.....	62
4.2.1 Uji Stasioneritas.....	62
4.2.2 Penentuan Lag Optimal.....	64
4.2.3 Uji Kointegrasi.....	65
4.2.4 Uji Stabilitas <i>Vector Autoregression</i> (VAR).....	66
4.2.5 Analisis <i>Vector Error Correction Model</i> (VECM).....	67
4.2.6 <i>Impulse Response Function</i> (IRF).....	71
4.2.7 <i>Variance Decomposition</i> .....	73
4.3 Pembahasan.....	74
4.3.1 Hubungan Tingkat Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan.....	74
4.3.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan.....	76

<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	79
5.1 Simpulan.....	79
5.2 Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	82
<b>LAMPIRAN</b> .....	87

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kategori Ketimpangan Pendapatan.....	21
Tabel 2.2 Interval Tingkat Kemandirian Fiskal .....	24
Tabel 4.1 Perkembangan Tingkat Kemandirian Fiskal di Sumatera (Persen) .....	48
Tabel 4.2 Perkembangan Tingkat Kemandirian Fiskal di Jawa & Bali (Persen).....	48
Tabel 4.3 Perkembangan Tingkat Kemandirian Fiskal di Kalimantan (Persen).....	49
Tabel 4.4 Perkembangan Tingkat Kemandirian Fiskal di Sulawesi (Persen).....	50
Tabel 4.5 Perkembangan Tingkat Kemandirian Fiskal di Indonesia Timur (Persen)	50
Tabel 4.6 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera (Persen) .....	53
Tabel 4.7 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa & Bali (Persen).....	54
Tabel 4.8 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan (Persen).....	55
Tabel 4.9 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi (Persen) .....	55
Tabel 4.10 Tabel 4.10 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Timur (Persen).....	56
Tabel 4.11 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan di Sumatera.....	59
Tabel 4.12 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan di Jawa & Bali.....	59
Tabel 4.13 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan .....	60
Tabel 4.14 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi .....	61
Tabel 4.15 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Timur .....	61
Tabel 4.16 Uji Stasioneritas .....	63
Tabel 4.17 Penentuan Lag Optimal.....	64
Tabel 4.18 Uji Kointegrasi.....	65
Tabel 4.19 Kao <i>Residual Cointegration Test</i> .....	66
Tabel 4.20 Estimasi <i>Vector Error Correction Model</i> (VECM).....	68
Tabel 4.21 Estimasi VECM <i>Granger Causality</i> .....	70



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat Kemandirian Fiskal Indonesia Tahun 2015-2020.....	7
Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2020 .....	8
Gambar 1.3 Koefisien Gini di beberapa Provinsi Tahun 2020 .....	10
Gambar 2.1 Kurva Pertumbuhan Ekonomi Kuznet .....	16
Gambar 2.2 (i) Kurva Pembagian Pendapatan Pareto, (ii) Kurva Kelompok Pendapatan Pareto .....	18
Gambar 2.3 Kurva Lorenz.....	20
Gambar 2.4 Kerangka Pikir.....	35
Gambar 4.1 Perkembangan Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah di Indonesia.....	46
Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia .....	52
Gambar 4.3 Ketimpangan Pendapatan di Indonesia .....	57
Gambar 4.4 Stabilitas VAR .....	67
Gambar 4.5 Hasil Uji <i>Impuls Response</i> .....	71
Gambar 4.6 Hasil Uji <i>Variance Decomposition</i> .....	73

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kinerja pembangunan ekonomi secara makro di Indonesia sering dilihat dari pendapatan per kapita penduduk, pertumbuhan, struktur, dan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi dapat dilihat dari berbagai indikator. Namun, dalam kasus ini indikator ketimpangan ekonomi yang digunakan yaitu ketimpangan pendapatan. Strategi yang digunakan pada periode pertama pembangunan dunia yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menimbulkan ketimpangan yang terjadi pada pembagian pendapatan dan ketimpangan ini berdampak lebih tinggi pada negara-negara berkembang. Permasalahan yang terjadi antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi sering juga disebut dengan *trade-off*. Apabila pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan tujuan utama untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka akan mengorbankan aspek pemerataan ekonomi. Sebaliknya, apabila pemerataan ekonomi merupakan tujuan utama pelaksanaan pembangunan ekonomi, maka harapan terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus disingkirkan (Hasibuan, 1993).

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi diantaranya kemiskinan, maka arah pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang selain untuk meningkatkan pendapatan nasional juga perlu menjamin pemerataan ekonomi sehingga pembangunan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk peningkatan dari sisi produksi, namun juga harus melakukan pencegahan agar jurang pemisah antara yang kaya dan miskin tidak semakin melebar.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Sejak tahun 1978 berbagai program pemerintah telah dilaksanakan seperti subsidi, pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), keseimbangan pembangunan wilayah, pembangunan desa terpadu, perluasan kesempatan kerja dengan program padat karya, pemberdayaan lulusan sarjana ke pelosok daerah, berbagai program inpres, pembinaan koperasi, transmigrasi, pembinaan pemuda-pemudi, peningkatan pendidikan dan keterampilan penduduk (Hasibuan, 1993). Sampai saat ini pemerintah melalui kementerian dan setiap dinas di daerah telah banyak melaksanakan berbagai macam program untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

Sebagai bagian dari integral pembangunan nasional, pembangunan daerah yang saat ini dijalankan yaitu berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Syarat dari pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah yaitu terbentuknya keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi antar daerah, serta pemberian bobot otonomi daerah yang seluas-luasnya. Sejak tahun 2001, kebijakan otonomi daerah mulai diterapkan dengan landasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menjadi hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah. Pola pengelolaan administrasi dan fiskal di Indonesia berubah menjadi bersifat desentralisasi yang merupakan implementasi dari kebijakan

otonomi daerah. Dari sisi keuangan telah mengubah konsep dana perimbangan pusat dan daerah menjadi kebijakan desentralisasi fiskal (Karianga, 2017).

Kusuma (2016) menyatakan desentralisasi fiskal merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola pembangunan guna memajukan perekonomian daerah atau pusat. Kebebasan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat diharapkan dapat memudahkan pengelolaan keuangan sehingga penyelenggaraan pembangunan daerah dapat terwujud dengan baik dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi fiskal mungkin merupakan alat yang berhasil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara maju atau industri, tetapi konsekuensinya di negara berkembang merupakan masalah yang kontroversial. Secara umum diyakini bahwa desentralisasi fiskal adalah cara yang berhasil untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran dan pendapatan publik (Stansel, 2005). Desentralisasi fiskal juga merupakan cara untuk mengalihkan kewenangan fiskal ke tingkat pemerintahan daerah dan membatasi kendali pemerintah pusat (Haniff dkk, 2014). World Bank (2000) juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat mejadi alat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Negara berkembang sangat tertarik dengan desentralisasi karena desentralisasi adalah sarana untuk meningkatkan efisiensi pengadaan barang publik dan pertumbuhan ekonomi. Sistem desentralisasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan lebih menyesuaikan layanan publik dengan kebutuhan lokal (Oates, 1972), yang pada gilirannya dapat mempercepat

mobilisasi pendapatan dan kinerja ekonomi negara. Martinez-Vazquez dan McNab (2003) mengusulkan bahwa peningkatan efisiensi pengadaan barang publik terkait desentralisasi dapat memperluas barang publik yang penting, termasuk infrastruktur dan layanan sosial sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang masih samar dan belum dapat dipastikan dengan jelas. Beberapa ekonom mengemukakan bahwa pemberlakuan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang berdasarkan pandangan bahwa hal itu mengarah pada alokasi sumber daya yang lebih baik dan sektor publik yang lebih produktif, dan mungkin lebih kecil. Ini mungkin karena kebijakan yang ditentukan secara lokal lebih mampu memperhitungkan kondisi regional dan lokal dalam penyediaan barang publik, seperti infrastruktur dan pendidikan, atau bahwa persaingan di antara berbagai tingkat pemerintahan mendorong tarif pajak yang lebih rendah dan produksi barang publik yang efisien di bawah kendala pendapatan (Thornton, 2007).

Desentralisasi fiskal mulai diberlakukan di Indonesia dengan beberapa pertimbangan seperti untuk memenuhi aspirasi daerah terkait penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi daerah, mengurangi ketimpangan antar daerah, menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nurhemi & Suryani

2015). Pada awalnya desentralisasi fiskal dilakukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*). Selain itu, kualitas pelayanan publik di daerah diharapkan dapat meningkat dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan dapat mengurangi ketimpangan pelayanan publik antar-daerah.

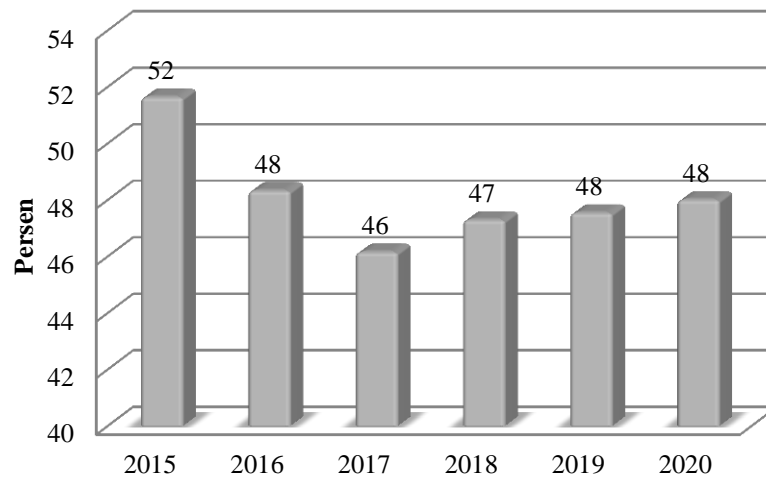
Pemerintah daerah diberikan wewenang agar dapat lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah, pemerintah daerah dituntut mengalokasikan belanja daerah untuk program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut. Pelaksanaan desentralisasi fiskal mengharapakan pemerintah daerah untuk lebih memiliki kemandirian dalam keuangan daerah. Metode pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah dengan dilihat melalui rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan kemandirian keuangan pada suatu daerah. Pada prinsipnya, semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerah tersebut yang artinya ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat semakin rendah. Apabila suatu daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga akan meningkat (Suci & Asmara, 2014).

Masalah kemandirian keuangan daerah menjadi tantangan serius bagi daerah, karena biaya pelayanan publik (*fiscal need*) daerah meningkat sedangkan



tingkat pertumbuhan pendapatan daerah (*fiscal capacity*) belum mencukupi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bekerja keras meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Peningkatan kemampuan keuangan daerah pada dasarnya merupakan optimalisasi sumber pendapatan daerah yang merupakan indikator tingkat kemampuan keuangan daerah itu sendiri (Kustianingsih & Kahar, 2018).

Tingkat kemandirian fiskal daerah di Indonesia secara agregat menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 hingga 2020. Gambar 1.1 menunjukkan tingkat kemandirian daerah di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2016 yang awalnya berada pada angka 52 persen menjadi 48 persen. Penurunan tingkat kemandirian fiskal ini terjadi pada pendapatan asli daerah. Penurunan tersebut terkait dengan dinamika perekonomian global yang belum pulih sejak 2015, dimana harga komoditas yang masih rendah, masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan dan melemahnya volume perdagangan. Dampak dari permasalahan yang terjadi pun tidak terlalu lama, pada tahun 2018 pendapatan asli daerah secara keseluruhan pun kembali meningkat dan tingkat kemandirian keuangan daerah perlahan mulai merangkak naik hingga tahun 2020. Tingkat kemandirian fiskal daerah kembali meningkat meskipun secara agregat belum melampaui angka 50 persen. Pada tahun 2020, tingkat kemandirian fiskal daerah hanya mencapai 48 persen yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah di Indonesia secara keseluruhan dapat dikatakan baik.



**Gambar 1.1 Tingkat Kemandirian Fiskal Indonesia Tahun 2015-2020**

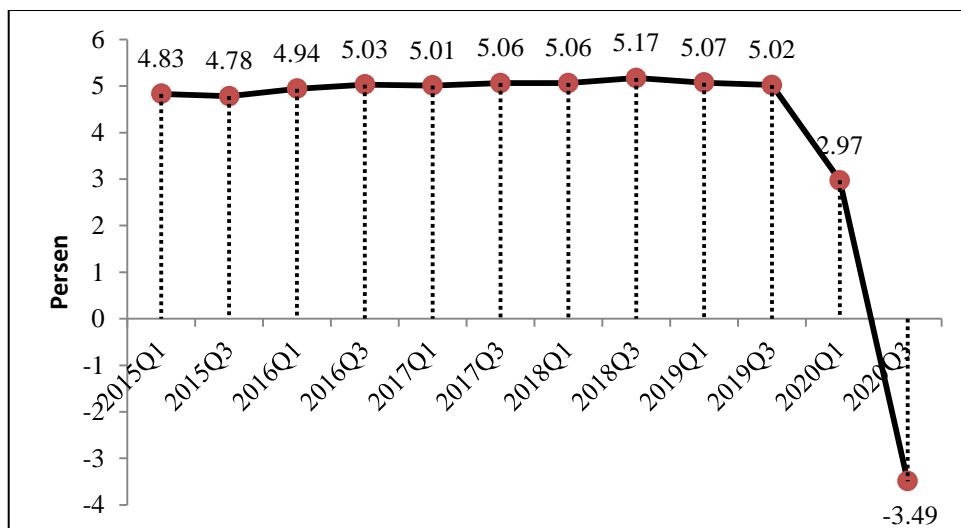
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021*

Menurut penelitian Oates (1993), desentralisasi fiskal akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah daerah akan lebih efektif dalam produksi dan penyediaan barang publik. Oates juga menyampaikan desentralisasi fiskal juga dapat meningkatkan efisiensi perekonomian yang terkait dengan pendorong pertumbuhan ekonomi (Dewi & Sutrisna, 2014).

Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat pada tahun 2010 setelah krisis global berakhir pada akhir tahun 2009 yaitu sebesar 6,38 persen, namun pada tahun 2011 laju pertumbuhan Indonesia kembali melambat menjadi 6,17 persen hingga tahun 2013 mencapai 5,56 persen. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perlambatan tersebut, salah satunya perlambatan pertumbuhan ekonomi global khususnya Negara China. Penurunan pertumbuhan ekonomi China akan berdampak langsung bagi Indonesia, hal ini disebabkan oleh China merupakan salah satu mitra dagang penting untuk Indonesia, karena China menyumbang hampir sepersepuluh dari total ekspor Indonesia. Selain

ketidakpastian ekonomi global yang terjadi, terdapat pula beberapa masalah keuangan, seperti defisit transaksi berjalan, inflasi tinggi yang menyebabkan peningkatan harga bahan bakar subsidi dan melemahnya nilai tukar rupiah juga berkontribusi pada perlambatan ekonomi (BPS, 2016).

Latar belakang gejolak ekonomi dalam beberapa tahun terakhir dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada kisaran 5 persen. Namun demikian, perekonomian Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup berat, yaitu stabilitas dan ketimpangan ekonomi kawasan serta tingkat pertumbuhan yang tidak stabil hingga kuartal kedua tahun 2017, 29 persen dari 34 provinsi di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Selain itu, tingkat pertumbuhan 32 persen provinsi lebih rendah dari rata-rata nasional (BPS, 2017).



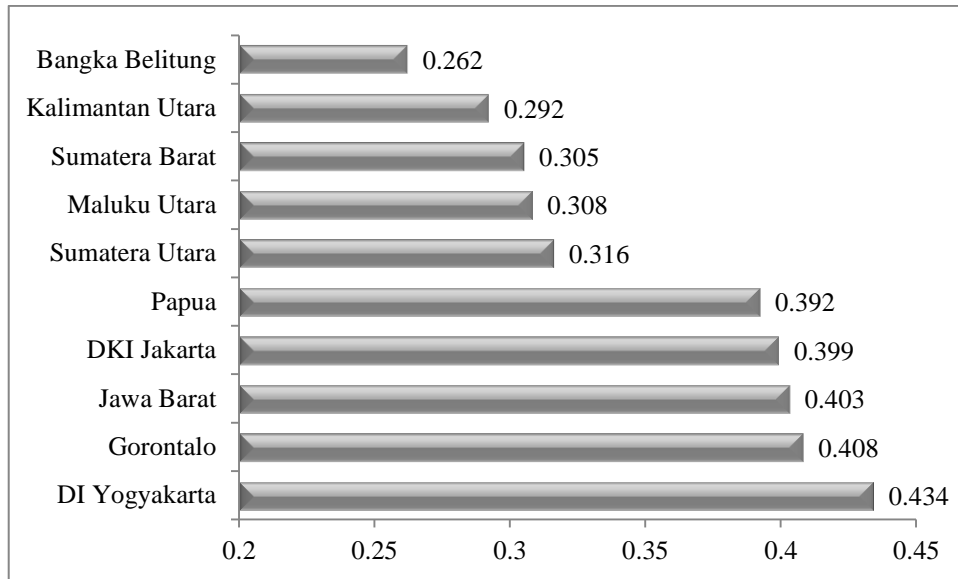
**Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2020**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021*

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang disebabkan krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Pada triwulan I tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun

dari triwulan IV tahun 2019 dengan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2,97 persen. Pertumbuhan Ekonomi pada triwulan II tahun 2020 kembali mengalami kontraksi mencapai 5,32 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2020 tercatat sebagai yang terburuk sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Pada triwulan III tahun 2020, pertumbuhan ekonomi juga mengalami kontraksi sebesar 3,49 persen namun sedikit membaik dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik menunjukkan mulai terjadi pemulihan pada perekonomian. Salah satu dampak langsung yang dirasakan masyarakat dari kontraksi angka pertumbuhan ekonomi ini menyebabkan pendapatan masyarakat kelompok menengah kebawah turun secara signifikan, hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap ketimpangan ekonomi akan semakin melebar.

Dari tahun 2015 hingga 2019, ketimpangan pendapatan di Indonesia mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik mencatat dari tahun 2016 sampai 2020 Provinsi DI Yogyakarta konsisten menduduki posisi pertama sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi. Ketimpangan tertinggi yang dicapai Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,440 yang membawanya menjadi provinsi dengan ketimpangan ekonomi tertinggi di Indonesia. Provinsi Gorontalo juga konsisten menduduki posisi kedua ketimpangan pendapatan tertinggi 5 tahun terakhir dengan ketimpangan tertinggi tahun 2017 sebesar 0,417. Provinsi yang menduduki posisi ketiga ketimpangan pendapatan tertinggi dari tahun 2016 sampai 2020 yaitu Provinsi Jawa Barat.



**Gambar 1.3 Koefisien Gini di beberapa Provinsi Tahun 2020**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021*

Provinsi Bangka Belitung dalam 5 tahun terakhir konsisten mempertahankan tingkat ketimpangan pendapatan yang sangat rendah atau dapat dikatakan memiliki distribusi pendapatan yang relatif merata dengan angka koefisien Gini 0.262 dan disusul beberapa provinsi lainnya antara lain Provinsi Kalimantan Utara yang konsisten berada di peringkat dua provinsi dengan ketimpangan ekonomi terendah atau distribusi pendapatan yang relatif merata dari tahun 2016 hingga 2020 yaitu sebesar 0.292. Provinsi berikutnya yang masuk kedalam lima peringkat ketimpangan ekonomi terendah yaitu Sumatera Barat dengan angka koefisien Gini 0,305, Maluku Utara dengan koefisien Gini 0.308 dan Provinsi Sumatera Utara sebesar 0.316.

Ukuran ketimpangan lain yang umum digunakan selain koefisien Gini yaitu persentase pengeluaran oleh 40 persen penduduk terbawah, yang merupakan ukuran WorldBank. Berdasarkan pengukuran ini, derajat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori: jika persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah

kurang dari 12 persen termasuk tingkat ketimpangan tinggi; jika angkanya antara 12-17 persen termasuk tingkat ketimpangan sedang; jika angka ini melebihi 17 persen, itu berarti ketimpangan rendah (BPS, 2020).

Walaupun desentralisasi fiskal telah dilaksanakan, namun pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi belum mampu berjalan beriringan. Beberapa daerah di Indonesia juga masih banyak yang belum memiliki kemandirian fiskal yang mumpuni dan masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap dana transfer pemerintah pusat. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait pengaruh dana transfer pusat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun penelitian yang mengkaji terkait hubungan antara tingkat kemandirian fiskal, pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi khususnya di Indonesia masih sedikit. Berdasarkan situasi tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam terkait hubungan jangka panjang maupun jangka pendek pada tingkat kemandirian fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan ekonomi.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana hubungan jangka panjang maupun jangka pendek pada tingkat kemandirian fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis hubungan jangka panjang maupun jangka pendek pada tingkat kemandirian fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia.



#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan informasi dan dapat berkontribusi kepada akademisi maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hubungan jangka panjang dan jangka pendek kemandirian fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak kajian empiris yang berkaitan dengan kemandirian fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan serta dapat dijadikan bahan evaluasi bagi semua pihak yang ingin mengkaji permasalahan ini.
- 3) Diharapkan penelitian ini menjadi masukan pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perencanaan ekonomi dan pembangunan daerah serta dapat menjadi gambaran atau masukan untuk menambah sumber ide dan menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi secara umum untuk mengembangkan penelitian penelitian selanjutnya.

##### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sederhana bagi pemerintah dan kalangan ekonom di Indonesia mengenai kemandirian fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam menentukan dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kemandirian fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adefeso, H. A., & Abioro, T. A. (2016). Fiscal Decentralisation and Economic Development in Nigeria: The Role of Democratic Institution. *Journal of Politics and Law*, 9(1), 1-10.
- Agusalim, L. (2016). Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Desentralisasi di Indonesia. *KINERJA*, 20(1), 53-68.
- Ahmad, I. (2020). Fiscal Decentralisation and Economic Growth. *Pakistan Journal of Applied Economics*, 30(1), 95-121.
- Amri, K. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Data Panel 8 Provinsi di Sumatera. *Jurnal EMT KITA*, 1(1), 1-11.
- Ananda, C. F. (2017). *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Aneja, R., Barkha, & Banday, U. J. (2021). Regional Economic Growth and Inequality in India: A Sector-Wise Decomposition Analysis. *Arthaniti: Journal of Economic Theory and Practice*, 20(1), 95-110.
- Apriesta, L. F., & Miyasto. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal Of Economics*, 2(1), 1-12.
- Arham, M. A. (2014). Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektoral, dan Ketimpangan Antar kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 14(2), 145-167.
- Ariansyah, M., Amir, A., & Achmad, E. (2014). Tingkat Ketergantungan Fiskal dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(3), 159-159.
- Bojanic, A. N. (2018). The Impact of Fiscal Decentralization on Growth, Inflation and Inequality in the Americas. *Cepal Review*.
- BPS. (2016). *Laporan Perekonomian Indonesia 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2017). *Laporan Perekonomian Indonesia 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020). *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021). *Statistik Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Branson, W. H. (1989). *Macroeconomic Theory and Policy*. New York: Harper and Row Publisher.
- Brida, J. G., Carrera, E. J. S., & Segarra, V. (2020). Clustering and Regime Dynamics for Economic Growth and Income Inequality. *Structural Change and Economic Dynamics*, 52, 99-108.
- Canare, T. (2020). Decentralization, Local Government Fiscal Independence, and Poverty: Evidence from Philippine Provinces. *Southeast Asian Journal of Economics*, 8(2), 77-108.
- Chrisamba, G., & Saraswati, B. D. (2016). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan 33 Provinsi di Indonesia. *Optimum: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 6(1), 42-51.
- Damayanti, D., Made, A., & Retnasari, A. (2021). The Effect of Local Own Income and Transfer Funds on Fiscal Independence with Capital Expenditures as an Intervening Variable. *7th Regional Accounting Conference (KRA 2020)* (pp. 111-117). Atlantis Press.
- Dewi, P. A. K., & Sutrisna, I. K. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(1), 32-40.
- Fisipol, UGM. (1991). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Litbang Depdagri.
- Gujarati, D., & Porter, D. (2011). *Dasar-dasar Ekonometrika* (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.
- Hanif, I., Chaudhry, I. S., & Wallace, S. (2014). Fiscal Autonomy and Economic Growth Nexus: Empirical Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 34(2), 767-780.
- Hanif, I., Wallace, S., & Gago-de-Santos, P. (2020). Economic Growth by Means of Fiscal Decentralization: An Empirical Study for Federal Developing Countries. *SAGE Open*, 10(4), 1-12.
- Hasibuan, P. (1993). *Pemerataan dan Pembangunan Ekonomi*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Hisyam, M., & Pamungkas, C. (2016). *Indonesia, Globalisasi, dan Global Village*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hyman, D. (1999). *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*. Orlando: The Dryden Press.

- Jhingan, M. L. (2018). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karianga, H. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Keuangan, K. (2020). *APBD Penting Dijalankan untuk Dorong Ekonomi Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kustianingsih, N., Muslimin, M., & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6), 82-91.
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 1-11.
- Kusuma, M. W., & Badrudin, R. (2016). Fiscal Decentralization Effect on Economic Growth in Bali. *Economic Journal of Emerging Market*, 8(2), 136-147.
- Lee, D. J., & Son, J. C. (2016). Economic Growth and Income Inequality: Evidence from Dynamic Panel Investigation. *Global Economic Review*, 45(4), 331-358.
- Lucas Jr, R. (1988). On The Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3-42.
- Mankiw, N. G. (2012). *Macroeconomics* (8th ed.). New York: Worth Publisher.
- Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal Decentralization and Economic Growth. *World Development*, 31(9), 1597-1616.
- Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2006). Fiscal Decentralization, Macrostability, and Growth. *Review of Public Economics*, 179(4), 25-49.
- Meloche, J. P., Vaillancourt, F., & Yilmaz, S. (2004). *Decentralization or Fiscal Autonomy? What Does Really Matter? Effects on Growth and Public Sector Size in European Transition Countries*. World Bank Policy Research Working Paper 3254.
- Mikucka, M., Sarracino, F., & Dubrow, J. K. (2017). When does Economic Growth Improve Life Satisfaction? Multilevel Analysis of the Roles of Social Trust and Income Inequality in 46 Countries, 1981–2012. *World Development*, 93, 447-459.
- Musgrave, R., & Musgrave, P. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). Singapore: McGraw-Hill.

- Nurhemi, N., & Suryani, G. (2015). Dampak Otonomi Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 18(2), 183-206.
- Oates, W. (1972). *Fiscal Federalism*. England: Harcourt Brace Jovanovich.
- Oates, W. E. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National tax journal*, 46(2), 237-243.
- Pasichnyi, M., Kaneva, T., Ruban, M., & Nepyaliuk, A. (2019). The Impact of Fiscal Decentralization on Economic Development. *Investment Management and Financial Innovations*, 16(3), 29-39.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Kementerian Keuangan.
- Sacchi, A., & Salotti, S. (2014). The Effects of Fiscal Decentralization on Household Income Inequality: Some Empirical Evidence. *Spatial Economic Analysis*, 9(2), 202-222.
- Salimi, F., Akhoondzadeh, T., & Arsalanbod, M. R. (2014). The Triangle of Trade Liberalization, Economic Growth and Income Inequality. *Communications on Advanced Computational Science with Applications*, 26(1), 1-15.
- Sasana, H. (2006). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Dinamika Pembangunan*, 3(2), 145-170.
- Sepulveda, C., & Martinez-Vazquez, J. (2011). The Consequences of Fiscal Decentralization on Poverty and Income Equality. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 29(2), 321-343.
- Sibirian, M. E. (2020). Fiscal Decentralization and Regional Income Inequality: Evidence from Indonesia. *Applied Economics Letters*, 27(17), 1383-1386.
- Sidik, M. (2002). *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Kompas.
- Sims, C. A. (1989). Models and Their Uses. *American Journal of Agricultural Economics*, 71(2), 489.

- Slavinskaitė, N. (2017). Fiscal Decentralization and Economic Growth in Selected European Countries. *Journal of Business Economics and Management*, 18(4), 745-757.
- Stansel, D. (2005). Local Decentralization and Local Economic Growth: A Cross-Sectional Examination of US Metropolitan Areas. *Journal of Urban Economics*, 57(1), 55-72.
- Stossberg, S., & Blöchliger, H. (2017). Fiscal Decentralisation and Income Inequality: Empirical Evidence from OECD Countries. *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*, 237(3), 225-273.
- Suci, S. C., & Asmara, A. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 3(1), 8-22.
- Szarowská, I. (2014). Fiscal Decentralisation and Economic Development in Selected Unitary European Countries. *European Financial and Accounting Journal*, 9(1), 22-40.
- Thornton, J. (2007). Fiscal Decentralization and Economic Growth Reconsidered. *Journal of Urban Economics*, 61(1), 64-70.
- Tiebout, C. M. (1961). An Economic Theory of Fiscal Decentralization. In *Public Finances: Needs, Sources, and Utilization*. Princeton University Press.
- Todaro, M., & Smith, S. (2013). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1* (Edisi 11). Jakarta: Erlangga.
- Trapeznikova, I. (2019). Methoden zur Messung von Einkommensungleichheit. *IZA World of Labor*.
- Yang, Y., & Greaney, T. M. (2017). Economic Growth and Income Inequality in The Asia-Pacific Region: A Comparative Study of China, Japan, South Korea, and the United States. *Journal of Asian Economics*, 48, 6-22.
- Younsi, M., & Bechtini, M. (2020). Economic Growth, Financial Development, and Income Inequality in BRICS Countries: Does Kuznets' Inverted U-Shaped Curve Exist?. *Journal of the Knowledge Economy*, 11(2), 721-742.